

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu prioritas utama yang berguna dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini termuat dalam pembukaan UUD 1945 bahwa “ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa “. Oleh sebab itu pendidikan menjadi perhatian utama pemerintah dalam upaya mencerdaskan para penerus bangsa yang dapat mempengaruhi kehidupan bangsa di masa depan. Peran pemerintah dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan pembelajaran seperti meningkatkan kualitas tenaga pengajar, memenuhi sarana dan prasarana dalam kegiatan belajar mengajar dan tersedianya sekolah – sekolah hingga pelosok negeri tanpa adanya perlakuan yang berbeda antar warga, sehingga semua warga memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Hal ini sesuai dengan landasan pokok keberadaan sistem pendidikan nasional yang tertuang pada UUD 1945 Bab XIII, Pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap – tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran tanpa ada perlakuan yang berbeda baik dari jenis kelamin, agama, ras, suku, latar belakang sosial dan

tingkat kemampuan ekonomi. Program pendidikan wajib belajar di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1950. Hal ini termuat dalam UU nomor 4 tahun 1950 dan UU no 12 tahun 1954 yang menyatakan bahwa setiap anak usia 8 sampai 14 tahun wajib mendapatkan pendidikan. (A.Daliman, 1995:138).

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Pelayanan publik dapat dilakukan di segala bidang baik pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Penelitian ini mengkhususkan di bidang pendidikan. Pelayanan publik pada bidang pendidikan ini menjadi pelayanan utama bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan peneliti menganggap bahwa pendidikan merupakan proses awal seseorang untuk melakukan pembelajaran baik secara formal maupun informal dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Sehingga pendidikan sangat penting bagi seseorang yang menginginkan adanya perubahan diri menjadi lebih baik. Pendidikan sebagai kebutuhan pokok masyarakat juga menjadi perhatian penting pemerintah sebagai penyedia layanan publik. Namun kualitas pelayanan pemerintah terutama di sektor pendidikan saat ini masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran paradigma dari *Rule Government* menjadi *Good Governance*. Menurut dokumen *United Nation Development Program* (UNDP: 2004), tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah “Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat”. Dengan demikian tata kelola pemerintahan yang baik

memerlukan adanya pelayanan publik yang baik pula. Peran pemerintah dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan pembelajaran seperti pelayanan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sekolah. Sekolah yang banyak dan tersebar di berbagai wilayah menyebabkan pemerintah pusat harus memberikan wewenangnya terhadap daerah sehingga adanya pembagian tugas yang dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik di bidang pendidikan tersebut maka pemerintah membentuk sebuah lembaga Dinas Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan.

Dinas pendidikan merupakan suatu lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan-urusan pada bidang pendidikan baik dari kurikulum, sarana dan prasarana serta kesiswaan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya yang cukup luas dalam pelayanan pendidikan ditingkat daerah maka kemudian dinas pendidikan melahirkan sebuah Unit pembantu dalam memudahkan pelayanan pendidikan tersebut dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di setiap kecamatan. Salah satu UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan ini yang menjadi tempat penelitian. UPT ini memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas dari Dinas Pendidikan di Bidang Pelayanan umum dan pengadaan sarana pendidikan. UPT ini berbentuk cabang dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah tanggung jawab Kepala Dinas. UPT Dinas Pendidikan ini memberikan pelayanan langsung terhadap lembaga pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pada tingkat sekolah menengah atas. Oleh sebab itu UPT ini harus memberikan contoh pelayanan yang baik terhadap

masyarakat demi menciptakan kualitas pendidikan yang baik dan bermutu. Oleh sebab itu diperlukannya para pegawai yang memiliki kemampuan yang mumpuni dalam bidang pendidikan. Namun realitasnya, UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan Jati Agung belum terlaksana dengan efektif dan efisien hal ini disebabkan oleh tidak seimbangnya jumlah pegawai/honorar terhadap beban kerja. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai yaitu 19 orang dan honorar 26 orang dengan beban kerja yang bersifat *fluktuatif*, yaitu beban kerja yang menumpuk hanya disaat tertentu saja. Beban kerja yang *fluktuatif* ini akan banyak pada saat UPT memiliki kegiatan di bidang pendidikan, seperti ketika sekolah melaksanakan ujian sekolah. Hal ini menyebabkan tidak efektifnya para pegawai dalam mengerjakan pekerjaan sehingga terjadi ketidakdisiplinan pegawai untuk datang ke kantor ketika pekerjaan telah selesai dihari sebelumnya.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* seperti indikator Transparansi belum diterapkan dengan baik di UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan Jati Agung seperti tidak adanya papan informasi tentang program-program yang dilaksanakan UPT tersebut, prinsip *Good Governance* lain seperti Partisipasi juga belum diterapkan di UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan Jati Agung yaitu masyarakat tidak bisa mengawasi program-program apa saja yang dilaksanakan UPT tersebut, prinsip Akuntabilitas juga belum diterapkan di UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan Jati Agung yaitu tidak adanya laporan pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat. (sumber: pra riset pada tanggal 22 Oktober 2013).

Berdasarkan uraian diatas maka penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* akan memiliki pengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai dalam melaksanakan pelayanan publik, dalam hal ini pelayanan publik di sektor pendidikan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Sektor Pendidikan Tahun 2013 di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* (Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas) terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai pada Sektor Pendidikan Tahun 2013 Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan ?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* (Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas) terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai pada sektor pendidikan Tahun 2013 Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis dapat memberikan kontribusi pemikiran dan perkembangan terhadap kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap efektivitas kinerja pegawai khususnya di bidang pendidikan.
- b. Secara praktis dapat menjadi masukan bagi stakeholders dalam hal ini UPT Dinas Pendidikan Lampung Selatan tentang pengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap efektivitas kinerja pegawai.